

Implementasi Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo

Esti Hartati¹, Nurliah Nurdin², Firman Hadi Rivai³
Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3}
esti.hartati@gmail.com¹

Abstract

Home industry is a type of micro business that is carried out at home and the majority of business actors are women. This can give women a role in helping to improve family welfare, create a workforce and be involved in development, especially in the economic sector. In developing home industries, the participation of both central and regional governments is needed, based on this, the Ministry of PPPA issued Ministerial Regulation Number 2 of 2016 concerning General Guidelines for the Development of Home Industries to Improve Family Welfare through Women's Empowerment, and 21 Districts/Cities were selected to become pilots. Kulon Progo Regency is one of the pilot areas for Home Industry development because of the high poverty rate. In its implementation, Kulon Progo Regency shows that the development of home industries is not yet optimal. The aim of the research is to analyze the causes of non-optimal implementation of home industry development in Kulon Progo as well as implementation strategies. This research is a qualitative approach by analyzing using the theory of Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, where there are four variables that can influence the performance and impact of a program, namely environmental conditions, inter-organizational relationships, organizational resources, and the characteristics and capabilities of implementing institutions. The results of the research show that the implementation of home industry development through women's empowerment in Kulon Progo Regency has not been optimal in terms of every variable, awareness of the mindset of business actors, training, coordination and budgeting so that a strategy is needed where cooperation, roles and joint commitment between government, academics, actors Businesses and community institutions are very important to achieve the same goals in developing home industries.

Keywords: Home Industry, Women Empowerment

Abstrak

Industri rumahan merupakan salah satu jenis usaha mikro yang dikerjakan di rumah dan sebagian besar pelaku usahanya adalah perempuan, hal ini dapat memberikan peran kepada perempuan untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, menciptakan tenaga kerja dan ikut terlibat dalam pembangunan terutama di bidang ekonomi. Dalam mengembangkan industri rumahan, perlu peran serta pemerintah baik pusat maupun daerah, berdasarkan hal ini, KemenPPPA mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan, dan 21 Kab/Kota terpilih untuk dijadikan percontohan. Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah percontohan pembangunan Industri Rumahan karena tingginya angka kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Kulon Progo menunjukkan perkembangan industri rumahan yang belum optimal. Tujuan penelitian untuk menganalisis penyebab ketidakoptimalan pelaksanaan pembangunan industri rumahan di Kulon Progo serta strategi pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis menggunakan teori Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, dimana terdapat empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, dan karakteristik dan kemampuan lembaga pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan industri rumahan melalui pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kulon Progo belum optimal dari setiap variabel, kesadaran pola pikir pelaku usaha, pelatihan-pelatihan, koordinasi dan penganggaran sehingga diperlukannya strategi dimana kerjasama, peran dan komitmen bersama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan lembaga masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan yang sama dalam pembangunan industri rumahan.

Kata Kunci: Industri Rumahan, Pemberdayaan Perempuan

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong pemberdayaan perempuan di segala aspek pembangunan. Perempuan harus memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan, guna tercapainya SDM bangsa yang unggul. Peningkatan SDM diantaranya melalui peningkatan kualitas perempuan.

Budaya patriarki di masyarakat Indonesia masih menjadi tantangan perempuan turut serta dalam pembangunan. Perempuan masih dianggap sebagai obyek pembangunan, padahal keterlibatan perempuan sebagai subyek pembangunan sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Pada pendekatan pemberdayaan perempuan, diasumsikan bahwa jika ingin memperbaiki posisi perempuan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya untuk tawar-menawar dan untuk merubah sendiri nasibnya. Artinya, pendekatan ini menghendaki pelibatan kaum perempuan tidak saja sebagai objek tetapi juga sebagai pelaku aktif, sebagai orang yang ikut merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. (Saptandari, n.d.)

Myrtle Faye Laberinto Solina dalam jurnalnya menulis tentang usaha perempuan yang terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam jurnalnya menunjukkan bahwa UMKM Filipina menjadi penggerak ekonomi, melalui Biro Usaha Kecil dan Menengah, Departemen Perdagangan Filipina yang bertindak sebagai Sekretariat Dewan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan diatur dalam Republic Act (RA) No.6977, atau Magna Carta untuk UMKM, mereka mengembangkan dan mengimplementasikan program dan proyek yang menjawab kebutuhan khusus UMKM. Program dan proyek ini mencakup bidang pengembangan dan transfer teknologi, pembiayaan, pemasaran, dan pelatihan. Biro Usaha Kecil dan Menengah diberi mandat untuk mempromosikan dan mengembangkan UMKM di dalam negeri dan juga bertugas untuk menilai dan mengusulkan kebijakan dan strategi yang diarahkan untuk kemajuan UMKM di bidang pengembangan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan peningkatan produktivitas.

Singapura juga menjadi salah satu yang mendukung usaha perempuan seperti yang ditulis Myrtle, pada tahun 2018, Departemen Statistik Singapura mempresentasikan bahwa UKM merupakan 99% dari total perusahaan dan menghasilkan hampir 69% dari total lapangan kerja di Singapura. Enterprise Singapore adalah lembaga pemerintah utama yang mendukung pengembangan perusahaan, mereka fokus pada membangun kapabilitas, inovasi dan internalisasi perusahaan yang berkomitmen, mereka juga menawarkan berbagai bantuan untuk UMKM, diantaranya bantuan keuangan, akses pasar dan *talent assistance* adalah yang paling populer. Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE) 2018 mencantumkan Singapura sebagai negara terbaik kelima dengan kondisi pendukung paling kuat dan peluang bagi perempuan untuk berkembang sebagai usaha. Selain itu, perempuan di Singapura menempati peringkat teratas dalam hal pengetahuan dan akses keuangan. Singapura juga menawarkan salah satu kondisi yang paling kondusif untuk mendorong kepemilikan usaha perempuan, seperti kemudahan berbisnis dan opini budaya perempuan sebagai pengusaha. (MFL Solina -2020 n.d.)

Dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan usaha perempuan sangat diperlukan, usaha mikro, kecil dan menengah telah menjadi motor penggerak ekonomi. Filipina dan Singapura terus mengembangkan kemampuan perempuan dan melibatkan pihak-pihak lain selain pemerintah untuk terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan usaha perempuan. Hal ini dapat menjadi masukan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di

Indonesia, peran dan dukungan pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk perkembangan usaha perempuan.

Terkait pemberdayaan ekonomi perempuan, Pemerintah Indonesia telah membuat program baik melalui instansi pemerintah maupun bekerjasama dengan lembaga non pemerintah, salah satunya yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah ialah Kementerian Perindustrian telah melakukan sejumlah inisiatif untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan dan meningkatkan proporsi perempuan dalam angkatan kerja. Kementerian Perindustrian telah bekerjasama dalam berbagai proyek dengan sektor swasta dan pihak pemerintah lainnya untuk meningkatkan kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan. (“Kemenperin” n.d.)

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyatakan peran perempuan dalam perekonomian di Indonesia tidak diragukan lagi, sebagian besar pelaku usaha mikro adalah perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam perekonomian perlu didorong dengan keberadaan kebijakan serta peraturan terkait UMKM yang mendukung perempuan. Perempuan tidak lagi dilihat sebagai pemain sekunder, tetapi sebagai pemain utama untuk keberlangsungan dan keberlanjutan usaha. (“KemenPPPA” n.d.)

Usaha mikro merupakan bentuk sistem ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin ketahanan nasional secara berkelanjutan. Jenis usaha mikro yang banyak dijumpai, terutama di pedesaan dan daerah tertinggal adalah sektor industri rumahan, dimana potensi dan aktivitas pekerjaannya sebagian besar adalah kaum perempuan. Menurut (Kusumaningrum n.d.) dalam penelitiannya menuliskan Perempuan belum memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kapasitas ekonominya secara mandiri, walaupun perempuan sesungguhnya dapat menjadi mitra strategis untuk mengembangkan perekonomian daerah/pedesaan melalui Industri Rumahan (*home industry*), dan hasil penelitiannya menunjukkan usaha yang dipimpin oleh seorang perempuan bisa menjadi media pembelajaran bagi semua kalangan masyarakat sehingga usahanya memberikan kemanfaatan ekonomi dan juga sosial-budaya.

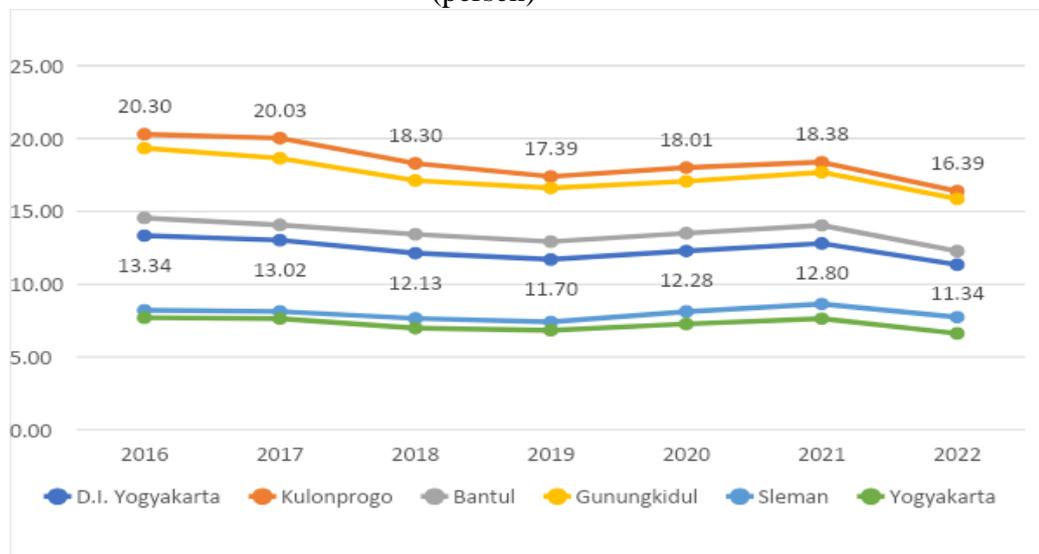
KemenPPPA melihat bahwa Industri Rumahan merupakan potensi besar yang ada di masyarakat jika dikelola dengan baik, dan akan memberi manfaat yang sangat signifikan untuk peningkatan kemampuan dan ketahanan ekonomi masyarakat. KemenPPPA sangat berkepentingan karena banyak pelaku usaha Industri Rumahan adalah perempuan dan mereka harus ditingkatkan kemampuannya agar nilai tambah dari pekerjaan mereka meningkat dan dapat memberikan lebih banyak peluang untuk memajukan dirinya.

Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan yang digagas KemenPPPA, telah diperkuat oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui Pemberdayaan Perempuan. Peraturan ini sebagai acuan bagi pemerintah dan para pihak yang berkepentingan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan industri rumahan. Sebagai percontohan, dipilih 14 Kab/Kota pada tahun 2016 dan 7 Kab/Kota pada tahun 2017, untuk melaksanakan pembangunan Industri Rumahan yang nantinya akan menjadi *role model* di daerah-daerah lain.

Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu daerah percontohan pembangunan Industri Rumahan karena memiliki angka kemiskinan tertinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta. Dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan industri rumahan, Kabupaten Kulon

Progo masih belum optimal, hampir di seluruh faktor pendukung pembangunan industri rumahan. Peran tim daerah dan peran pendamping sangat penting bagi keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan industri rumahan.

Grafik 1. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2017 – 2022 (persen)



Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik Provinsi D I Yogyakarta

Grafik 1 memperlihatkan grafik persentase kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo semakin menurun setiap tahunnya tetapi masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022, Kabupaten Kulon Progo masih menjadi daerah dengan jumlah miskin tertinggi di D.I. Yogyakarta.

Lokasi pembangunan industri rumahan di Kulon Progo mencakup 3 Kecamatan dan 5 Desa, pemilihan wilayah tersebut merupakan wilayah yang dianggap miskin tetapi mempunyai potensi industri rumahan yang bisa dikembangkan. Jenis usaha Industri Rumahan di Kulon Progo, mayoritas adalah produksi olahan pangan, sisanya kerajinan dan menjahit dan pelaku industri rumahan di Kulon Progo adalah Perempuan.

Tabel 1 berikut merupakan jumlah pelaku usaha industri rumahan berdasarkan desa yang menjadi percontohan, jumlah tersebut merupakan hasil pemetaan yang dilakukan oleh KemenPPPA bekerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, D.I. Yogyakarta.

Tabel 1. Hasil Pemetaan Pembangunan Industri Rumahan di Kulon Progo Tahun 2017

No	Desa	Jumlah			
		IR	IR-1	IR-2	IR-3
1	Ngentakrejo, Kecamatan Lendah	20	0	17	3
2	Bumirejo, Kecamatan Lendah	20	0	16	4
3	Tuksono, Kecamatan Sentolo	19	0	12	7
4	Sukoreno, Kecamatan Sentolo	15	0	12	3
5	Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo	20	7	13	0
Jumlah		94	7	70	17

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pengembangan Pelaku IR

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan pada pasal 9 yaitu ukuran keberhasilan pembangunan industri rumahan dilihat dari meningkatnya jumlah pelaku atau jumlah industri rumahan yang menjadi usaha kecil di seluruh daerah secara merata dan berkesinambungan dan juga tercapainya tujuan pembangunan Industri Rumahan yaitu untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan produktif yang dikerjakan di rumah dengan dukungan anggota keluarga serta mengembangkan industri kreatif yang menjadi kekuatan perempuan dalam industri rumahan serta mendorong penguatan jaringan Industri Rumahan.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis keoptimalan dan menganalisis strategi dalam memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo.

KAJIAN LITERATUR

Industri Rumahan

Industri Rumahan merupakan suatu sistem produksi yang menghasilkan suatu produk melalui proses pembentukan nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dilakukan di lokasi rumah dan bukan di suatu lokasi khusus (seperti pabrik), dengan menggunakan alat-alat produksi yang sederhana.

Proses produksi tersebut memanfaatkan prasarana, sarana, serta peralatan produksi lainnya yang dimiliki oleh perorangan/kelompok usaha bersama/koperasi. Umumnya produk dari Industri Rumahan berupa buatan tangan, bersifat unik pada cara-cara yang berbeda nyata, serta sering dikaitkan dengan kearifan lokal dan teknologi tepat sasaran. (Anak 2016)

Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, IR termasuk kelompok Usaha Mikro, dimana banyak negara memasukkan pada kategori sektor informal. Sebagian besar IR belum mempunyai legalitas sebagai badan usaha dan seringkali tidak terdaftar dalam mekanisme perpajakan bisnis. Selain itu, IR biasanya dikelola oleh anggota suatu keluarga, meski ada pengecualian pada yang sudah dikategorikan maju dan menerapkan manajemen industri. IR bisa juga berwujud Kelompok Usaha Bersama yang terorganisir secara informal dan lentur dimana masing-masing anggotanya bekerja di rumah masing-masing, sehingga disepadankan dengan istilah Industri Rumah Tangga (IRT).

Tujuan pembangunan industri rumahan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan produktif yang dikerjakan di rumah dengan dukungan anggota keluarga serta mengembangkan industri kreatif yang menjadi kekuatan perempuan dalam industri rumahan serata mendorong penguatan jaringan Industri Rumahan.

Industri rumahan mempunyai potensi untuk memperkuat ketahanan keluarga, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan relasi anggota keluarga yang lebih harmonis. Industri rumahan mendorong kemandirian perempuan di bidang ekonomi yang juga berdampak pada pengambilan keputusan.

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No.2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan, adalah upaya terstruktur untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol,

dan manfaat dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peningkatan peran perempuan. (Anak 2016)

Secara garis besar, pemberdayaan merupakan proses menciptakan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk mampu secara mandiri mengatasi segala persoalan yang dihadapinya, dan berkuasa atas segala aspek yang berkaitan dengan kehidupannya.

Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dengan pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya dan perlu untuk diikutsertakan dalam pembangunan. (Hikmah 2015)

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sebuah kebijakan, dimana implementasi merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan tercapai.

Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam bukunya mendefinisikan implementasi sebagai proses interaksi antara penetapan tujuan dan tindakan yang diarahkan untuk mencapainya. Masih menurut Cheema dan Rondinelli, berbagai faktor politik, sosial, perilaku, ekonomi dan organisasi mempengaruhi sejauh mana kebijakan diimplementasikan sesuai tujuannya dan sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang sohih yang dipersyaratkan kualitatif yaitu wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen, dan dengan melakukan triangulasi. (Komariah 2011)

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis keoptimalan pelaksanaan pembangunan industri rumahan, peneliti mengacu pada teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli. Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni:

1. Kondisi lingkungan; mencakup lingkungan sosial kultural dan keterlibatan penerima program/kebijakan, struktur politik nasional, infra struktur politik, serta berbagai organisasi kepentingan dan tersedianya sarana, prasaran fisik.
2. Hubungan antar organisasi; dalam implementasi sebuah program diperlukan dukungan, koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dan kelompok-kelompok lain yang berkepentingan, guna mencapai keberhasilan suatu program.
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program; implementasi kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana; kemampuan para pelaksana di bidang keterampilan teknis, manajerial dan politik, kemampuan untuk merencanakan,

mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengintegrasikan setiap keputusan, baik yang berasal dari sub-sub unit organisasi, maupun dukungan yang datang dari pihak lain.(Cheema, G.Shabbir and Rondinelli 1983)

Kinerja dan dampak kebijakan dapat diukur berdasarkan pencapaian tujuan kebijakan yang ditetapkan; dampaknya terhadap kapasitas unit-unit pemerintahan dan lembaga-lembaga lokal dalam perencanaan, mobilisasi sumber daya, dan pelaksanaan, dan dampaknya terhadap produktivitas, pendapatan, partisipasi masyarakat, dan akses terhadap fasilitas pemerintah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pembangunan industri rumahan di Provinsi D.I. Yogyakarta khususnya di wilayah Kabupaten Kulon Progo merupakan program yang diinisiasi pada tahun 2017 – 2018, diharapkan akan memberi nilai tambah yang signifikan untuk peningkatan kemampuan dan ketahanan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan perempuan dan juga diharapkan para pelaku industri rumahan dapat memberikan kontribusi penghasilan untuk ketahanan ekonomi rumah tangga yang kemudian dapat menjadi penguatan ketahanan ekonomi daerah.

Kabupaten Kulon Progo merupakan Kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta yang memiliki angka kemiskinan paling tinggi. Kabupaten Kulon Progo memiliki 10 Kecamatan, 3 diantaranya dijadikan sebagai lokasi pembangunan industri rumahan yang dianggap sebagai kecamatan memiliki kemiskinan tinggi tetapi mempunyai potensi industri rumahan yang dapat dikembangkan, yaitu Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Girimulyo. Berdasarkan dari pemetaan yang dilakukan oleh KemenPPPA bekerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, ditetapkan 94 pelaku usaha industri rumahan dan semuanya adalah Perempuan dari 3 kecamatan yang menjadi lokasi pembangunan industri rumahan.

Pembangunan Industri Rumahan di Kulon Progo memiliki potensi yang sangat bagus selain dari Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh 3 kecamatan lokasi pembangunan industri rumahan, di Kabupaten Kulon Progo juga telah dibangun Bandar Udara yaitu Yogyakarta International Airport yang mulai beroperasi sejak akhir tahun 2019, hal ini memberikan ruang pasar yang luas untuk produk-produk Industri Rumahan.

Pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo mendasar pada Nota Kesepahaman antara KemenPPPA dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembangunan Industri Rumahan bagi Perempuan di Kabupaten Kulon Progo Nomor: 19/KPP-PA/D.I/06/2017 dan Nomor: 26/MoU.KP/HKM/2017, selanjutnya Nota Kesepahaman ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Asisten Deputi urusan Ekonomi, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, KemenPPPA dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Nomor SPK-15/PPK/Satker.Dep.KG/ Asdep2/06/2017 dan Nomor 460/2778/PKS/-Dinsos.KP/1017. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan terkait Implementasi Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo. Analisis penelitian menggunakan teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, dimana terdapat empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja suatu program atau kebijakan, yakni:

1. Kondisi Lingkungan

Pemahaman mengenai lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mendasari munculnya kebijakan sangat penting untuk memahami hambatan dan peluang bagi organisasi pelaksana untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan. Selain itu, karakteristik struktur kekuasaan lokal, karakteristik sosial dan budaya kelompok yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan administrasi serta sejauh mana pengorganisasian penerima manfaat juga berperan dalam implementasi kebijakan, begitu pula dengan kecukupan infrastruktur fisik untuk pembangunan mendistribusikan manfaatnya.

Kemiskinan masih menjadi faktor utama dalam munculnya kebijakan pembangunan industri rumahan melalui pemberdayaan perempuan, hal ini sesuai dengan dasar pemilihan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah percontohan pembangunan industri rumahan melalui pemberdayaan perempuan, berdasarkan data Susenas, Kabupaten Kulon Progo memiliki angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Yogyakarta pada tahun 2017-2022. Pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo mendasar pada Nota Kesepahaman antara KemenPPPA dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembangunan Industri Rumahan bagi Perempuan di Kabupaten Kulon Progo Nomor: 19/KPP-PA/D.I/06/2017 dan Nomor: 26/MoU.KP/HKM/2017, selanjutnya Nota Kesepahaman ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Asisten Deputi urusan Ekonomi, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, KemenPPPA dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Nomor SPK-15/PPK/Satker.Dep.KG/Asdep2/ 06/2017 dan Nomor 460/2778/PKS/-Dinsos.KP/1017.

Para pelaku Industri Rumahan di Kabupaten Kulon Progo yang seluruhnya adalah perempuan pada dasarnya sudah menjalankan usahanya sebelum adanya program industri rumahan, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pendamping usaha.

“Semua pelaku usaha sebenarnya sudah menjalankan usahanya sebelum adanya program industri rumahan sehingga adanya program industri rumahan dengan bantuan alat yang dibutuhkan, diharapkan dapat memperkuat usahanya”

Hal ini tidak diikuti dengan *mindset* para pelaku, masih terdapat pelaku usaha yang merasa cukup dengan apa yang sudah mereka terima, seperti yang disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo:

“Pembangunan industri rumahan telah mencapai tujuan tetapi belum maksimal, hal ini dikarenakan belum terbukanya *mindset* para pelaku industri rumahan terhadap pengembangan usahanya, beberapa pelaku merasa cukup dengan apa yang mereka dapatkan sehingga tidak mau melangkah lebih maju. Para pelaku industri rumahan yang sudah terbuka *mindset* wirausahanya sudah bisa mengembangkan kualitas dan kuantitas usahanya, mereka juga sudah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai *stakeholder* untuk pengembangan usahanya”.

Pola pikir atau *mindset* pelaku usaha dapat menjadi salah satu kendala untuk mencapai tujuan suatu kebijakan atau program. Pelaku usaha industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo yang seluruhnya adalah perempuan, berdasarkan kategori

usia termasuk ke dalam kategori usia sangat produktif antara 15-49 tahun sebesar 73%, seharusnya dapat menjadi peluang untuk keberlanjutan usaha yang cukup tinggi. Pelaksanaan pembangunan industri rumahan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dapat berperan dalam meningkatkan kemampuan dan membantu ketahanan ekonomi keluarga, sejalan dengan UU No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Jenis usaha yang dilakukan paling banyak adalah olahan pangan sebesar 82%, selebihnya usaha kerajinan tangan dan menjahit. Usaha olahan pangan yang dilakukan diantaranya keripik dari berbagai bahan pangan, pembuatan tahu, pembuatan tempe dan sebagainya. Olahan pangan menjadi paling banyak diminati karena pelaku usaha semuanya adalah perempuan yang mempunyai kemampuan memasak dan bahan baku yang digunakan mudah terjangkau. Tetapi harga bahan baku di daerah setempat yang lebih mahal masih menjadi kendala keberlangsungan usaha, seperti yang disampaikan oleh pendamping usaha dan pelaku usaha

“harga barang baku dari luar lebih murah daripada daerah sekitar. Secara kualitas, bahan baku daerah setempat lebih bagus tetapi untuk usaha, pelaku usaha tetap mencari bahan yang lebih murah sehingga mengambil dari luar daerah setempat”

Hal ini menjadi salah satu alasan tidak berjalannya usaha pelaku industri rumahan sehingga usahanya berhenti.

“bahan sulit didapat dan mahal sehingga pemasaran sulit”

Bahan baku yang jauh dari tempat produksi, membuat modal menjadi lebih besar. Selain itu, bahan baku yang bersifat musiman juga membuatnya sulit diperoleh. Jumlah dan harga bahan baku yang tidak stabil juga menjadi kendala utama industri untuk berkembang karena berkaitan dengan modal produksi yang dibutuhkan. Kendala lainnya yaitu dari aspek permodalan lainnya adalah peralatan untuk produksi, tidak memiliki mesin yang modern (sudah tua) dan mudah rusak dan jumlah alat produksi yang kurang mencukupi.

Wilayah pemasaran produk usaha industri rumahan mayoritas di sekitar desa, disebabkan karena pelaku usaha industri rumahan adalah ibu rumah tangga atau petani yang kesehariannya melakukan kegiatan di rumah dan di kebun sehingga daerah pemasaran untuk usahanya di sekitaran rumah atau desa. Tenaga kerja yang digunakan sebagian besar adalah anggota keluarga dari pelaku usaha industri rumahan dikarenakan masih kesulitan dalam pemberian upah.

Selain hal-hal di atas, infrastruktur juga dapat menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri rumahan. Infrastruktur pada masing-masing wilayah pelaksanaan industri rumahan berbeda-beda. Berdasarkan laporan pelaksanaan industri rumahan tahun 2017, kondisi sarana transportasi tergolong kategori baik sekitar 62% dengan jalan yang cukup baik dan alat transportasi yang berkondisi baik. Kondisi listrik mayoritas dikategorikan baik karena frekuensi mati listrik rendah dan daya listrik pendukung yang cukup. Faktor lain yang

menjadi pertimbangan adalah lokasi pelaku usaha yang cukup jauh dapat menjadi kendala dalam pembangunan industri rumahan.

2. Hubungan antar Organisasi

Implementasi memerlukan interaksi dan koordinasi di tingkat pemerintahan, tindakan yang saling melengkapi oleh lembaga-lembaga lokal, regional, dan nasional, dan kerja sama antara organisasi non-pemerintah dan kelompok penerima manfaat. Keberhasilan menghubungkan lembaga-lembaga pelaksana dengan lembaga lain ke dalam jaringan yang saling mendukung, penting untuk mencapai tujuan kebijakan.

Tujuan dan sasaran pembangunan industri rumahan melalui pemberdayaan perempuan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 yaitu untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan produktif yang dikerjakan di rumah dengan dukungan para anggota keluarga, mengembangkan industri kreatif menjadi kekuatan perempuan dalam industri rumahan dan memperkuat jaringan industri rumahan, adapun sasarannya adalah usaha mikro yang dikelola oleh dan/atau menjadi tempat kerja kaum perempuan. Dimana ini merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan melalui pemberian akses teknologi, pemasaran dan modal, untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang kuat lintas sektor.

Koordinasi internal tim daerah menjadi salah satu faktor pendukung pembangunan industri rumahan yang belum optimal di Kabupaten Kulon Progo. Dalam pelaksanaan pembangunan industri rumahan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo membentuk Tim Pelaksanaan Pengembangan Industri Rumahan Daerah yang disahkan dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan IR di Kulon Progo Tahun 2017, yang terdiri dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo; Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada; Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; dan Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo juga menyatakan:

“Dalam pembinaan pelaku industri rumahan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo bekerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan pembinaan, memberikan pelatihan, menyampaikan informasi terkait pengembangan usaha dan lainnya”. Selain itu, hubungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan beberapa *stakeholders* maupun pendamping industri rumahan sangat baik, saling memberikan informasi yang kemudian disampaikan kepada pelaku industri rumahan”

Pernyataan ini sejalan dengan pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo selalu mengikutsertakan pelaku Industri Rumahan dalam pelatihan-pelatihan, pameran-pameran, Dinas Kesehatan memberikan PIRT (pangan industri rumah tangga) bebas biaya kepada sejumlah pelaku industri rumahan untuk memperluas cakupannya. PIRT merupakan

sertifikasi perizinan bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman dengan skala rumahan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada juga melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan dengan menggunakan APBN berupa Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan Penggiat Industri Rumahan, pelatihan berupa pengemasan, jual beli online, pemasaran, diversifikasi produk olahan, dan sebagainya.

Sebagai tindak lanjut dari Tim pelaksana industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo menunjuk 3 (tiga) orang sebagai tenaga pendamping desa untuk mendukung keberhasilan pembangunan industri rumahan di Kulon Progo, penunjukkan tenaga pendamping desa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo Nomor 460/300/2017.

Koordinasi dan komunikasi telah dilakukan tetapi belum secara formal, koordinasi dan komunikasi dilakukan jika ada pelatihan bersama atau adanya pelaksanaan program yang bersamaan dan dilakukan melalui telepon. Rapat koordinasi tim pelaksana digabung dengan rapat yang lain, hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, karena untuk melakukan rapat koordinasi memerlukan anggaran khusus. Setiap dinas yang melakukan pelatihan selalu mengundang pelaku usaha industri rumahan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui *whatsapp* group.

3. Sumber Daya Organisasi

Lingkungan yang kondusif dan hubungan organisasi yang efektif merupakan kondisi yang diperlukan. Sejauh mana lembaga menerima cukup dukungan finansial, administratif, dan teknis yang efisien, sejauh mana lembaga-lembaga pelaksana mempunyai kendali atas dana, kecukupan alokasi anggaran untuk melaksanakan program, ketersediaan sumber daya yang tepat waktu bagi lembaga-lembaga pelaksana, dan kecukupan atau wewenang peningkatan pendapatan dan pengeluaran di tingkat daerah mempengaruhi implementasi kebijakan.

KemenPPPA mengeluarkan kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui industri rumahan untuk membantu meningkatkan ekonomi perempuan. Sebagai salah satu daerah percontohan, Kabupaten Kulon Progo selama pelaksanaan percontohan tahun 2017 – 2018, anggaran pembangunan industri rumahan didasarkan pada program KemenPPPA. Dukungan permodalan telah diberikan pada awal pelaksanaan usaha yang bersumber dari APBN dengan memberikan bantuan alat usaha sesuai dengan usaha yang dijalankan tetapi disayangkan tidak semua bantuan alat yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, spesifikasi alat masih model lama dan tidak sesuai dengan peruntukan usaha sehingga pelaku usaha masih tetap menggunakan alat mereka sendiri. Permodalan yang bersumber dari APBN lainnya adalah Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan Penggiat Industri Rumahan, kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo sendiri belum mendapat anggaran cukup dari APBD, alokasi anggaran APBD Kabupaten Kulon Progo terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

Ketidalcukupan anggaran disampaikan pula oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.

“minimnya anggaran terkait pemberdayaan perempuan menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo. Anggaran yang belum memadai juga dapat menghambat keberlanjutan pelaksanaan pembangunan industri rumahan”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pendamping pelaku usaha:

“Pagu anggaran tidak mendukung, setiap kegiatan digabungkan dengan kegiatan lainnya” dan juga,

“Hambatan sebagai pendamping pelaku usaha, tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan usaha, sehingga sulit untuk berkembang, untuk pelaku usaha juga pelatihan hanya sekali dan alat yang diterima tidak sesuai”

Minimnya anggaran untuk pendampingan industri rumahan menjadikan pendamping jarang untuk melakukan kunjungan ke pelaku industri rumahan sehingga koordinasi dengan tim daerah dilakukan pada waktu-waktu tertentu tidak ada pertemuan rutin untuk membahas pelaksanaan industri rumahan.

4. Karakteristik dan Kemampuan Lembaga Pelaksana

Karakteristik organisasi internal lembaga pelaksana menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencakup keterampilan teknis dan manajerial dari staf lembaga tersebut, kapasitasnya untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengintegrasikan setiap keputusan. Selain itu, sifat dari kualitas komunikasi internal, hubungan lembaga dan pendukungnya, serta efektivitas hubungan dengan organisasi swasta, begitu pula kualitas kepemimpinan dalam lembaga, penerimaan dan komitmen terhadap tujuan kebijakan.

Karakteristik dan kemampuan lembaga pelaksana juga menjadi variabel penting dalam melaksanakan kebijakan. Variabel ini juga menjadi salah satu penghambat ketidakefektifan suatu kebijakan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo menunjuk 3 (tiga) orang sebagai tenaga pendamping desa dari Kader Penanggulangan Kemiskinan Desa (KPKD) untuk mendukung keberhasilan pembangunan industri rumahan di Kulon Progo. Pendamping industri rumahan merupakan seseorang yang membimbing dan membantu pelaku usaha dalam pelaksanaan usahanya. Pendamping juga sebagai perantara antara pelaku usaha dengan pemerintah. Pendamping menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan industri rumahan dengan memberikan informasi-informasi yang didapatkan selama proses pendampingan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk keberlanjutan industri rumahan.

Pendampingan untuk pelaku usaha diperlukan untuk, memberikan pendampingan teknis untuk menindaklanjuti pengembangan kemampuan pelaku industri rumahan terkait pengembangan produk, perencanaan produksi, kualitas dan manajemen usaha serta keuangan sehingga kualitas produk industri rumahan yang

dihasilkan akan lebih baik, sehingga perlu adanya pelatihan bagi pendamping industri rumahan.

Tim pendamping industri rumahan berasal dari pendamping program lain. Salah satu keberhasilan dalam pendampingan industri rumahan adalah upaya bersama pemerintah daerah untuk mengusahakan dan mendampingi pelaku industri rumahan dalam kepengurusan izin produk industri rumahan. Pendamping industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo memiliki latar belakang pengalaman pendampingan masyarakat dalam program lain sehingga terbiasa melakukan pendekatan ke masyarakat, tetapi pemahaman dalam pengembangan usaha masih minim sehingga perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan pelatihan-pelatihan terkait pengembangan usaha khususnya terkait dengan fungsi dan penugasan pendamping desa.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pendamping pelaku usaha industri rumahan “pendamping usaha tidak diberikan pelatihan terlebih dahulu tetapi langsung ditunjuk” pendamping usaha lainnya juga menyatakan bahwa “pendamping pelaku usaha industri rumahan tidak diberikan dukungan”. Pendamping tidak memiliki jadwal pendampingan yang khusus, selama ini bertugas untuk mengawal, memantau bantuan alat produksi dari pemerintah kepada pelaku industri rumahan, dan pada tahun 2019 tim pendamping jarang berkunjung ke lokasi industri rumahan untuk melakukan kerja pendampingan

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Pembangunan Industri Rumahan di Kabupaten Kulon Progo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembangunan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal, dari setiap variabel pengukuran terdapat faktor yang menjadi penghambat keoptimalan pelaksanaan yaitu:
 - a. Kondisi Lingkungan
Pelaku usaha industri rumahan telah melaksanakan usahanya sebelum adanya program industri rumah, tetapi pola pikir mereka yang masih berpikir sudah cukup dengan yang mereka dapatkan sehingga sulit untuk dikembangkan. Selain SDM, bahan baku wilayah sekitar yang mahal sehingga mencari bahan baku di daerah lain yang artinya akan ada tambahan biaya untuk mendapatkan bahan baku seperti transport atau biaya kirim
 - b. Hubungan Antar Organisasi
Bupati Kulon Progo telah mengeluarkan Keputusan pembentukan tim pelaksana pengembangan industri rumahan pada tahun 2017 yang terdiri dari beberapa dinas terkait dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Walaupun Dinas-dinas terkait selalu melibatkan pelaku industri rumahan dalam setiap pelatihan, pameran yang dilaksanakan, tetapi pada pelaksanaannya komunikasi dan koordinasi yang terjalin belum dilakukan secara formal dengan sesama tim pelaksana pengembangan industri rumahan, koordinasi yang dilakukan saat pelaku industri rumahan mengikuti pelatihan bersama atau pada saat pelaksanaan program yang saling terlibat. Hubungan antar organisasi belum berjalan secara optimal untuk

pelaksanaan dan keberlanjutan pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo

c. Sumber Daya Organisasi

Minimnya dukungan anggaran khusus untuk pelaksanaan industri rumahan menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya pembangunan dan keberlanjutan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan industri rumahan belum mendapat anggaran cukup dari APBD. Pelaksanaan kegiatan industri rumahan digabungkan dengan kegiatan lain yang hampir sama. Dukungan anggaran untuk pendamping usaha juga sangat minim, sehingga koordinasi hanya dilakukan melalui telepon dan itupun hanya ketika ada masalah. tidak adanya peraturan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan industri rumahan.

d. Karakteristik dan Kemampuan Lembaga Pelaksana

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo telah menunjuk 3 tenaga pendamping pelaku usaha tetapi penunjukkan tidak dibarengin dengan pelatihan untuk tenaga pendamping. Pendamping industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo memiliki latar belakang pengalaman pendampingan masyarakat dalam program lain tetapi masih perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan pelatihan-pelatihan terkait pengembangan usaha khususnya terkait dengan fungsi dan penugasan pendamping desa.

2. Pelaksanaan pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo hanya diperkuat oleh Keputusan Bupati Kulon Progo tentang pembentukan tim pelaksana pengembangan industri rumahan yang melibatkan beberapa Dinas untuk dapat melibatkan pelaku industri rumahan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tetapi belum didukung dengan penganggaran yang cukup sehingga dalam pelaksanaannya untuk pembangunan dan keberlanjutan masih belum optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo perlu meningkatkan koordinasi antar Dinas, akademisi dan pendamping usaha industri rumahan, untuk melakukan pemetaan kembali pelaku usaha industri rumahan, merancang kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan industri rumahan serta untuk mengurai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para pelaku industri rumahan supaya dapat berkembang. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas pendamping industri rumahan dalam pengembangan usaha.
2. Sebagai dasar dari proses pelaksanaan pembangunan industri rumahan, diperlukan payung hukum yang dapat menjadi dasar dan penguatan proses pelaksanaan pembangunan industri rumahan terutama untuk penganggaran baik pelaksanaan maupun pendampingan pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo.
3. Koordinasi dan Kerjasama antara Lembaga pemerintah, akademisi, pendamping usaha dan pelaku usaha perlu ditingkatkan dan diperjelas masing-masing perannya untuk keberlanjutan dan replikasi pembangunan industri rumahan. Hal ini dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya, masing-masing peran diperjelas dalam peraturan ataupun keputusan yang akan menjadi dasar hukum semua pelaksana serta penguatan untuk penganggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. 2016. "Peraturan Menteri No.2/2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan" X: 1–21.
- Cheema, G.Shabbir and Rondinelli, Dennis A. 1983. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. SAGE Publications, Beverly Hills, California.
- Hikmah, Miftahul. 2015. "Pemberdayaan Perempuan Pada Home Industry Sulam Kain Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Home Industry Sulam Kain Di Dusun Selorentek Desa." <http://etheses.iainkediri.ac.id/292/>.
- "Kemenperin." n.d. <https://kemenperin.go.id/artikel/23870/Dukung-Kemajuan-Industri,-Menperin:-Berdayakan-Kaum-Perempuan-Jadi-Strategi->.
- "KemenPPPA." n.d. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3790/menteri-pppa-perempuan-berdaya-secara-ekonomi-bangsa-sejahtera>.
- Komariah, Djam'an Satori & Aan. 2011. "Metodologi Penelitian Kualitatif," no. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Kusumaningrum, Demeiati Nur. n.d. "Pengaruh Perspektif Pemberdayaan Perempuan Dalam Kebangkitan Ekonomi Lokal: Industri Tempe Sagu Di Dusun Mrisi-Yogyakarta." *Eprints.Umm.Ac.Id*. <http://eprints.umm.ac.id/58021/>.
- MFL Solina -2020. n.d. "Assessment of Business Environment of Women Involved in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Philippines: A Comparative Study with Select ASEAN." *Journal.Binus.Ac.IdMFL SolinaJAS (Journal of ASEAN Studies)*, 2020•*journal.Binus.Ac.Id* 8 (2): 191–211. <https://doi.org/10.21512/jas.v8i2.6617>.
- Saptandari, Pinky. n.d. "Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan." *Jurnal Kebudayaan Masyarakat Dan Politik. Journal.Unair.Ac.Id*.

